

**Judul** : Kasus Suap Proyek Satmon : Jumat Keramat Dirasakan Kabiro Perencanaan Bakamla  
**Tanggal** : Sabtu, 12 Agustus 2017  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 4

## Kasus Suap Proyek Satmon

# Jumat Keramat Dirasakan Kabiro Perencanaan Bakamla

KPK kembali memeriksa Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Nofel Hasan, Jumat kemarin. Usai diperiksa, tersangka kasus korupsi pengadaan perangkat satellite monitoring (satmon) itu langsung dikerangkeng.

"Ditahan 20 hari pertama di Rutan Guntur," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.

Penahanan dilaksanakan setelah penyidik menilai perkara atas nama tersangka sudah memenuhi unsur subyektif dan obyektif. Terlebih, lanjutnya, penetapan status tersangka terhadap Nofel Hasan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek satmon sudah dilakukan sejak 12 April 2017.

Hasil penyidikan menyimpulkan, tindakan tersangka Nofel

Hasan memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang keabsahan maupun tentang perlunya penahanan.

Selama ini, KPK kerap melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi menjelang akhir pekan. Lantaran kebiasaan itu, muncul istilah Jumat keramat.

Nofel ditetapkan sebagai tersangka karena bersama-sama dengan pihak lainnya menerima hadiah atau janji yang diduga diberikan terkait jabatannya se-

bagai PPK. Dia diduga menerima uang sebanyak 104.500 dolar Amerika terkait proyek satmon.

Dalam kasus ini, Nofel merupakan tersangka kelima. Empat tersangka berasal dari pihak sipil dan ditangani KPK. Satu orang tersangka ditangani Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI karena tentara aktif.

Para tersangka adalah Direktur PT Melati Techno Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah, Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla Eko Susilo Hadi, dan dua anak buah Fahmi, Muhammad Adami Okta, serta Hardy Stefanus. Sementara, satu tersangka yang ditetapkan. Puspom TNI yaitu Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama

Bambang Udoyo.

Kemarin, KPK juga memanggil Sekjen DPR Achmad Djuned. Febri menyatakan, yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka Nofel Hasan. "Untuk melengkapi berkas perkara tersangka NH," sebutnya.

Febri pun belum bersedia menjelaskan, apakah saksi Achmad Djuned dikorek keterangannya mengenai dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus tersebut.

Dia memastikan, kesaksian Sekjen DPR tentunya berkaitan dengan tugas dan fungsi kesekjen. "Hal-hal yang berhubungan dengan agenda rapat dan penganggaran proyek satelit monitoring Bakamla," katanya.

Ditambahkan, Setjen DPR mempunyai jadwal maupun agen-

da, serta materi pembahasan setiap rapat yang dilakukan di DPR. "Hal-hal itu yang sekiranya digali oleh penyidik," kata Febri.

Menjawab pertanyaan, apakah berkas perkara Nofel Hasan sudah lengkap, Febri menyatakan, dalam waktu dekat bakal dilimpahkan ke penuntutan.

"Penyidik tinggal mengkompilasi bukti-bukti lain baik hasil temuan di lapangan maupun yang terungkap di persidangan. Itu perlu juga diklarifikasi kepada saksi-saksi," ujar Febri.

Febri menandakan pengungkapan kasus ini dilakukan secara proporsional. Tidak ada upaya melindungi oknum yang bermasalah. "Kita proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya. ■ GPG